

**COLLABORATIVE GOVERNANCE MITIGASI BENCANA BANJIR DI INDONESIA:
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR) DARI TAHUN 2018-2023**

Amanda Alvina Hapsari, Amni Zarkasyi Rahman

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

23/12
2024

ABSTRACT

Much research has been carried out regarding collaborative governance in flood disaster mitigation. However, there has been no research regarding the structure of knowledge development on the topic of collaborative governance, flood disaster mitigation. Therefore, it is necessary to understand collaborative governance for flood disaster mitigation through a systematic literature review process as an effort to find novelty. The systematic literature review process was carried out using PRISMA guidelines. The literature search site used is Google Scholar. The inclusion criteria for the selected articles are: 1) Published in English and Indonesian, 2) Published from 2018-2023, 3) Availability of literature using articles with full text, 4) Publication stage in the form of final press and 5) Document type in the form of a journal. The development of publications in the field of collaborative governance in flood disaster management in Indonesia shows an increase in numbers from year to year, with the most publications in the period 2018 to 2023, namely in 2023 with the prominent keyword "disaster" which has a connection between keywords and keywords. others are "mitigation" and "flash flood". The analysis carried out by researchers revealed that there are six aspects that are dimensions in collaborative governance for flood disaster mitigation, including: Network structure, Commitment to shared goals, Trust between participants, Access to authority, Sharing information, Access to resources. The aspect that is much discussed is commitment to goals, while the aspect that is less discussed is access to power. Therefore, researchers suggest that aspects that have not been widely discussed, namely access to power, be studied more in future research.

Keywords: *collaborative governance, flood mitigation, systematic literature review*

ABSTRAK

Penelitian mengenai collaborative governance mitigasi bencana banjir telah banyak dilakukan. Namun, penelitian mengenai struktur perkembangan pengetahuan dengan topik collaborative governance mitigasi bencana banjir belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, perlu mengetahui collaborative governance mitigasi bencana banjir melalui proses systematic literature review sebagai upaya menemukan kebaruan. Proses systematic literature review dilakukan dengan menggunakan pedoman PRISMA. Adapun situs pencarian literatur yang digunakan adalah Google Scholar. Kriteria Inklusi dari artikel yang dipilih ialah: 1) Dipublikasikan dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, 2) Dipublikasikan daritahun 2018-2023, 3) Ketersediaan literatur menggunakan artikel dengan teks lengkap, 4) Tahap publikasi berupa final press dan 5) Tipe dokumen berupa journal. Perkembangan publikasi bidang collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir di Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun, dengan publikasi terbanyak pada periode tahun 2018 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2023 dengan kata kunci yang menonjol yaitu “disaster” yang memiliki ketersambungan kata kunci dengan kata kunci lainnya yaitu “mitigation” dan “flash flood”. Analisis yang dilakukan peneliti mengungkapkan, ada enam aspek yang menjadi dimensi dalam tata kelola kolaboratif mitigasi bencana banjir, antara lain: Struktur jaringan , Komitmen terhadap tujuan bersama, Kepercayaan antar peserta, Akses terhadap otoritas, Berbagi informasi, Akses terhadap sumber daya. Aspek yang banyak dibahas adalah komitmen terhadap tujuan, sedangkan aspek yang kurang banyak dibahas adalah akses terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar aspek yang belum banyak dibahas yaitu akses terhadap kekuasaan lebih banyak diteliti pada penelitian selanjutnya.

Kata kunci : *collaborative governance, mitigasi banjir, systematic literature review*

Pendahuluan

Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik sehingga rawan terhadap bencana (Basuki, 2019). Berbagai bencana alam, termasuk banjir, sering terjadi di Indonesia (Madani et al., 2022). Banjir ini merupakan bencana alam yang melanda wilayah yang dialiri sungai dengan jumlah yang cukup banyak (Madani et al., 2022). Banjir merupakan kondisi di mana air meluas di suatu daerah sehingga menutupi permukaan tanah di wilayah tersebut (Muhammad & Aziz, 2020). Banjir membawa kerusakan serta mengganggu jalannya aktivitas ekonomi dan sosial (Faiza et al., 2022). Banjir ini adalah yang pertama dalam skala global dan menyebabkan 55% dari semua bencana serta 38% di Indonesia. Banjir menimbulkan banyak kerugian baik secara materil (harta benda) maupun moral (psikologis) (Romadhan et al., 2023) oleh sebab itu pemerintah merencanakan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bencana sebelum dan sesudah bencana benar-benar terjadi (Arfani, 2022).

Menurut data statistik dari BNPB, telah tercatat 8.333 kejadian banjir di Indonesia mulai dari tahun 2014 hingga 2023. Walaupun fenomena tersebut mengalami perkembangan dinamis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun terlihat bahwa angka kejadian banjir dari

tahun 2015 hingga 2020 terus meningkat. Peningkatan terjadi setelah tahun 2019. Tahun 2020 mencatatkan rekor tinggi dalam jumlah banjir di Indonesia, mencapai 1.531 kejadian banjir. Namun demikian, meskipun statistik banjir menunjukkan penurunan sejak 2021, kerusakan yang diakibatkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah kejadian banjir terendah tercatat pada tahun 2023, dengan hanya terjadi 351 kasus.

Perkembangan publikasi terkait topik penelitian *collaborative governance* di Indonesia mengalami jumlah perkembangan yang pesat dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan para peneliti banyak yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *collaborative governance* di Indonesia. Perkembangan publikasi terkait topik *collaborative governance* di Indonesia dari tahun 2018-2023, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah publikasi terbanyak tentang *collaborative governance* di Indonesia ada pada tahun 2023 yaitu sejumlah 20.000. Sedangkan, jumlah publikasi paling sedikit tentang *collaborative governance* di Indonesia yaitu pada tahun 2018 yaitu sejumlah 6.860.

Perkembangan publikasi terkait topik penelitian mitigasi banjir di Indonesia mengalami jumlah perkembangan yang pesat dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan para peneliti banyak yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai mitigasi banjir di Indonesia. Perkembangan publikasi terkait topik mitigasi banjir di Indonesia dari tahun 2018-2023, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah publikasi terbanyak tentang mitigasi banjir di Indonesia ada pada tahun 2023 yaitu sejumlah 4.020. Sedangkan, jumlah publikasi paling sedikit tentang mitigasi banjir di Indonesia yaitu pada tahun 2018 yaitu sejumlah 1.260.

Perkembangan publikasi terkait topik penelitian *collaborative governance* mitigasi banjir di Indonesia mengalami jumlah perkembangan yang pesat dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan para peneliti banyak yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *collaborative governance* mitigasi banjir di Indonesia. Perkembangan publikasi terkait topik *collaborative governance* mitigasi di Indonesia dari tahun 2010-2023, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah publikasi terbanyak tentang *collaborative governance* mitigasi banjir di Indonesia ada pada tahun 2023 yaitu sejumlah 158. Sedangkan, jumlah

publikasi paling sedikit tentang *collaborative governance* mitigasi banjir di Indonesia yaitu pada tahun 2011 yaitu sejumlah 2.

Penelitian mengenai *collaborative governance* yang diambil dari database *Google Scholar*. Perkembangan pesat pada topik ini sayangnya tidak dibahas lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya yang membahas mengenai struktur perkembangan pengetahuan pada topik “*Collaborative Governance* pada Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia”. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “***Collaborative Governance Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia: Systematic Literature Review (SLR) dari Tahun 2018 Sampai 2023***”.

Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *System Literature Review* (SLR) bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan akurat tentang suatu fenomena. *System Literature Review* (SLR) dipilih sebagai langkah untuk mengumpulkan data berkualitas tinggi dari berbagai sumber.

Data sekunder dipilih peneliti untuk memperoleh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data yang

tidak diperoleh secara langsung, namun diperoleh melalui artikel yang telah terpublikasi dalam jurnal nasional dan internasional ternama dengan topik tertentu yaitu *Google Scholar*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sistematika literatur review (SLR), yaitu metode yang mengkaji topik pembahasan tertentu yang diidentifikasi dan disusun untuk dikategorikan, dievaluasi, disimpulkan, dan dipilih berdasarkan tolak ukur yang telah ditentukan berdasarkan bukti dan fakta penelitian kualitatif.

Teknik analisis data menggunakan metode *systematic literature review* (SLR) melalui database *google scholar* dengan menggunakan ketentuan inklusi dan eksklusi serta menggunakan kata kunci "*collaborative governance*" OR "*collaborative actor*" OR "*governance participation*" AND "*disaster mitigation*" AND "*flood*" AND "*Indonesia*". Hasil publikasi dokumen dikumpulkan melalui *Google Scholar*, *Microsoft Excel* dan *VosViewers* digunakan sebagai alat untuk ekstraksi dan visualisasi data.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tren perkembangan kata kunci yang telah dianalisis menggunakan *VosViewers*, terdeteksi kata kunci yang telah dikelompokkan

berdasarkan warna. Warna-warna yang ada disetiap kata kunci menunjukkan tahun perkembangannya. Semakin terang warna kata kunci tersebut, maka kata kunci tersebut termasuk dalam tren yang baru. Kata kunci yang memiliki keterbaruan pada perkembangan tahun 2018-2023 ditunjukkan dengan warna kuning. Kata kunci yang terdeteksi warna kuning, antara lain: *flash flood, governance, flash rob, environmental education, risk*.

Kata kunci berikutnya terdeteksi warna hijau yang menunjukkan keterbaruan pada perkembangan tahun 2018-2023 yang berada pada posisi 1 tingkat di bawah kata kunci yang terdeteksi warna kuning. Kata kunci yang terdeteksi warna hijau, antara lain : *disaster, flood disaster, disaster management, mitigation, policy implementation, community, sustainable development goals, nurses, productivity, communication*.

Kata kunci berikutnya terdeteksi warna tosca yang menunjukkan keterbaruan pada perkembangan tahun 2018-2023 yang berada pada posisi 1 tingkat di bawah kata kunci yang terdeteksi warna hijau . Kata kunci yang terdeteksi warna tosca, antara lain: *twitter, training, public policy, implementation, knowledge, collaborative governance, west java, community participation, floods, community*.

Kata kunci berikutnya terdeteksi warna biru yang menunjukkan keterbaruan pada perkembangan tahun 2018-2023 yang berada pada posisi 1 tingkat di bawah kata kunci yang terdeteksi warna tosca . Kata kunci yang terdeteksi warna biru, antara lain: *system dynamic, flood, strategy, preparedness, participatory mapping*.

Kata kunci berikutnya terdeteksi warna ungu yang menunjukkan keterbaruan pada perkembangan tahun 2018-2023 yang berada pada posisi 1 tingkat di bawah kata kunci yang terdeteksi warna biru. Kata kunci yang terdeteksi warna ungu, antara lain: *covid-19, evaluation, disaster mitigation, how to cite, watershed*.

Dimensi Proses Collaborative Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia

Dimensi proses pelaksanaan *collaborative governance* pada mitigasi banjir di Indonesia yang sering muncul adalah *commitment to a common purpose* yaitu sebesar 25%. Dimensi paling banyak yaitu *commitment to a common purpose* ditulis di sinta 3 dan 4 dari sitasi (Widyaningsih, 2021a), (Dirga & Djafar, 2023), (Riska et al., 2023), (Hasna & Darumurti, 2023), (Hidayatullah et al., 2023a).

Komitmen terhadap tujuan bersama menjadi kunci dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif, di mana setiap lembaga yang terlibat harus saling berkomitmen terhadap visi dan misi yang diusung. Visi dan misi ini kemudian diimplementasikan melalui program kerja yang fokus pada pengurangan risiko bencana, baik dari segi struktural maupun non-struktural. Menurut teori Edward Deseve (DeSeve, 2007), pencapaian tujuan bersama sangat tergantung pada adanya komitmen dari semua pihak yang terlibat. Agar tujuan ini dapat terwujud secara efektif dan efisien, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses kerjasama. Selain itu, mereka juga harus memahami kepentingan bersama, hubungan timbal balik, dan tanggung jawab yang diemban. Kesadaran akan hal ini sangatlah penting, karena tanpa komitmen yang nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan, proses kerjasama tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Diskusi Dimensi Proses Pelaksanaan Collaborative Governance Pada Mitigasi Banjir di Indonesia

a. Networked Structure

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan proses kolaborasi dapat dilakukan dengan

membangun jaringan (Hasna & Darumurti, 2023) bahwa Pemerintah Kota Pekalongan dan Yayasan BINTARI, sebuah lembaga swadaya masyarakat, telah membangun semacam jaringan yang berjalan dengan prinsip pemerintahan sendiri. Dalam kerjasama ini, kedua elemen tersebut saling berbagi sumber daya, bertukar ide, dan memperbincangkan berbagai persepsi. Meskipun demikian, mereka tetap mematuhi kesepakatan bersama yang mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kolaborasi ini bersifat inklusif dan tidak terpengaruh oleh monopoli. Lebih lanjut, penelitian (Hidayatullah et al., 2023) menunjukkan bahwa pembangunan jaringan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya BPBD Kota Semarang dan Dinas Pekerjaan Umum, tetapi juga melibatkan kontribusi dari pihak swasta dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan teori Edward DeSeve (DeSeve, 2007) yang menekankan pentingnya struktur jaringan untuk menghubungkan berbagai elemen agar dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa adanya struktur jaringan sangat penting untuk menjalin hubungan antara berbagai unsur, sehingga bisa meraih tujuan yang diinginkan. Proses terbentuknya struktur jaringan dalam konteks *collaborative governance* di antara para partisipan

menunjukkan bahwa indikator struktur jaringan memainkan peran kunci dalam mendukung kelancaran proses tata kelola yang kolaboratif.

b. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen Terhadap Tujuan)

Komitmen terhadap tujuan bersama menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kolaboratif, penting untuk adanya kesepakatan dan dedikasi di antara lembaga-lembaga yang berkolaborasi, yang didasarkan pada visi dan misi yang serupa. Penelitian yang dilakukan (Hidayatullah et al., 2023) menunjukkan bahwa tanpa adanya komitmen yang serius untuk mencapai tujuan yang diinginkan, BPBD Kota Semarang tidak akan mampu memberikan arahan dan tujuan yang jelas dalam proses kerjasama. Hal ini sejalan (Hasna & Darumurti, 2023) yang membuktikan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM Yayasan BINTARI berbagi visi dan misi yang sama dalam penanganan bencana banjir di Pekalongan. Mereka berkomitmen untuk mengelola situasi ini dengan sebaik-baiknya, agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi kemungkinan banjir di masa depan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Riska et al., 2023) berpendapat bahwa belum ada kesepakatan mengenai pelaksanaan kerja sama penanganan banjir,

penanggulangan banjir dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing kewenangan. Penelitian (L. Hazimah et al., 2024) berpendapat bahwa komitmen kepada setiap pemangku kepentingan harus diwujudkan dalam prosedur yang jelas, adil dan transparan. Pendekatan ini sejalan dengan teori Edward Deseve (DeSeve, 2007), yang menekankan bahwa untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan komitmen kolektif dari semua pihak terlibat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para pemangku kepentingan telah menyepakati pentingnya kerjasama, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan bersama tersebut.

c. Trust Among the Participants **(Kepercayaan dalam proses)**

Kepercayaan terhadap proses kerjasama merupakan salah satu faktor pendukung terpenting dalam keberhasilan kolaborasi tersebut. Penelitian yang dilakukan (Hidayatullah et al., 2023) menunjukkan bahwa BPBD Pemerintah Kota Semarang memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak swasta untuk berkontribusi secara aktif dalam penanganan banjir di lingkungan mereka masing-masing. Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kerjasama ini, semua pihak telah membangun rasa saling percaya di antara para pemangku kepentingan.

Kepercayaan ini menjadi faktor kunci dalam kolaborasi, yang tercermin dari semangat gotong royong yang berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasna & Darumurti, 2023) juga menunjukkan bahwa usaha untuk membangun kepercayaan antara Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM Yayasan BINTARI terwujud melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada 24 Juni 2022.

Penelitian (L. Hazimah et al., 2024) berpendapat bahwa prinsipnya, para pemimpin kelompok dalam suatu instansi harus mampu membangun kepercayaan dengan pegawainya agar dapat memperkuat kepercayaan antar pemain yang terlibat. Penelitian (Riskha et al., 2023) juga berpendapat bahwa pelaksanaan kolaborasi dalam penanggulangan banjir dilaksanakan dengan musyawarah atau rapat secara tatap muka antar pemangku kepentingan.

Hal ini sejalan dengan teori Edward Deseve (DeSeve, 2007) yang menekankan pentingnya rasa saling percaya antar pemangku kepentingan dalam mencegah ketidakpercayaan guna mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan sebuah hubungan profesional yang terjalin di antara institusi-institusi yang terlibat setelah kesepakatan perjanjian kerjasama.

d. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)

Proses kerjasama melibatkan sejumlah ketentuan yang disepakati dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Penelitian yang dilakukan (Hidayatullah et al., 2023a) menunjukkan bahwa BPBD Pemerintah Kota Semarang memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi secara aktif dalam penanganan banjir di wilayah mereka masing-masing. Selain itu, (Hasna & Darumurti, 2023) membuktikan bahwa dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM Yayasan BINTARI telah didukung oleh regulasi dan landasan hukum yang jelas, seperti RPJMD Kota Pekalongan, RPJP Kota Pekalongan, RKPD Daerah, serta Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Mitigasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ini sejalan dengan teori Edward Deseve (DeSeve, 2007) yang menekankan bahwa dalam proses kerjasama, terdapat serangkaian prosedur yang harus diterima dan diikuti oleh semua pemangku kepentingan.

e. *Information Sharing* (pembagian informasi)

Program kerja sama harus memastikan bahwa informasi mengenai

kegiatan kolaborasi ini dapat disebarluaskan kepada pihak-pihak di luar lembaga yang terlibat. Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayatullah et al., 2023) menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan situs web dan media online secara optimal sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang penanganan banjir di Kota Semarang. Dalam penelitian yang dilakukan (Hasna & Darumurti, 2023) dikemukakan bahwa salah satu kelebihan pendekatan kedua adalah kemudahan penyebaran informasi melalui media sosial, yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun, perlu diingat bahwa informasi yang disampaikan cenderung bersifat permukaan dan hanya memberikan gambaran umum. Hal ini sejalan dengan teori (DeSeve, 2007) yang menekankan pentingnya program kerjasama dalam menjamin penyebaran informasi kepada pihak-pihak di luar lembaga peserta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fokus utama dari pertukaran informasi adalah pada penyebaran informasi kepada audiens yang lebih luas.

f. *Access to Resources* (akses terhadap sumber daya)

Akses terhadap sumber daya, terutama sumber daya manusia, diakui oleh masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung yang sangat penting. Penelitian

yang dilakukan oleh (Hasna & Darumurti, 2023) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan bekerja sama dengan LSM Yayasan BINTARI untuk saling berbagi sumber daya demi mencapai tujuan bersama dalam mitigasi bencana banjir di kota tersebut. Penelitian (Hidayatullah et al., 2023) membuktikan bahwa Walikota Hendrar Prihardi, dengan slogan "Bergerak Bersama Menuju Semarang Hebat," telah sukses menciptakan pemerintahan yang baik dan berkolaborasi dengan masyarakat Kota Semarang dalam upaya mengatasi masalah banjir. Pendekatan ini sejalan dengan teori Edward Deseve mengenai akses terhadap sumber daya manusia. Menurut Deseve (DeSeve, 2007), proses kolaborasi memerlukan ketersediaan sumber daya finansial, teknis, dan manusia agar tujuan bersama dapat tercapai.

Kesimpulan

1. Perkembangan publikasi bidang *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dengan publikasi terbanyak pada periode tahun 2018 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2023 sebanyak 156 publikasi. Publikasi paling sedikit terjadi pada tahun 2018 dan 2020, masing-masing sebanyak 19 dan 36 publikasi.

Berdasarkan pengembangan publikasi dengan topik *Collaborative Governance* di bidang penanggulangan bencana banjir di Indonesia, posisi teratas jurnal dipegang oleh Jurnal Administrasi Publik dengan 3 publikasi terindeks Sinta 5. Berdasarkan kata kunci yang dianalisis menggunakan VosViewers terdapat kata kunci yang lebih menonjol daripada kata kunci lainnya. Kata kunci "disaster" terdeteksi lebih menonjol daripada kata kunci lainnya. Berdasarkan tren perkembangan kata kunci, terdeteksi kata kunci dengan warna kuning yang menunjukkan keterbaruan penelitian tahun 2018-2023 yaitu *flash flood*, *governance*, *flash rob*, *environmental education*, *risk*.

2. Temuan utama dari hasil tersebut adalah terdapat pembelajaran penting yang dapat dipetik dari *Collaborative Governance* untuk mitigasi bencana banjir, yaitu dimensi-dimensi dari *Collaborative Governance* untuk mitigasi bencana banjir. Analisis yang dilakukan peneliti mengungkapkan, ada enam aspek yang perlu diperhatikan dan menjadi dimensi dalam tata kelola

kolaboratif mitigasi bencana banjir, antara lain: Struktur jaringan (network Structure), Komitmen terhadap tujuan bersama (commitment to goal), Kepercayaan antar peserta (kepercayaan pada proses), Akses terhadap otoritas (access to power), Berbagi informasi (sharing information), Akses terhadap sumber daya (access to resources).

Rekomendasi

Penelitian ini telah menyajikan hasil *Systematic Literature Review* dari *google scholar* perihal tren penelitian dalam topik *Collaborative Governance* Mitigasi Bencana Banjir untuk menemukan dimensi-dimensi yang banyak didiskusikan dalam artikel *collaborative governance* mitigasi banjir di Indonesia. Sehingga dari hasil temuan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian mengenai *Collaborative Governance* Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia tergolong cukup peminat. Namun, masih terjadi naik turun jumlah penelitian menurut dokumen yang terpublikasi. Selain itu, penelitian terdahulu tentang *collaborative governance* mitigasi bencana banjir di Indonesia, metode

yang digunakan mayoritas menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif tanpa ada kebaruan. Oleh karena itu, untuk studi selanjutnya seharusnya menggunakan metode yang baru untuk mengatasi persoalan tersebut. Kebaruan metode yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis topik *collaborative governance* mitigasi bencana banjir di Indonesia adalah metode *systematic literature review* (SLR)

2. Dimensi-dimensi dalam tata kelola kolaboratif untuk mitigasi bencana banjir mencakup beberapa elemen penting, seperti struktur jaringan, komitmen terhadap proses, kepercayaan antar peserta, akses kepada otoritas, pertukaran informasi, serta ketersediaan sumber daya. Upaya yang dilakukan agar program tata kelola risiko banjir yang kolaboratif dapat berjalan efektif, para pemangku kepentingan perlu berkomitmen untuk bekerja sama dengan berdasar pada visi dan misi yang sama. Visi dan misi ini kemudian dirumuskan lebih lanjut dalam program kerja pengurangan risiko bencana, yang mencakup pendekatan struktural maupun non-struktural.

Berdasarkan dimensi-dimensi dalam *collaborative governance* mitigasi bencana banjir di Indonesia, terdapat salah satu dimensi yaitu *aces to authority* yang memiliki presentase paling kecil. Hal ini menunjukkan belum banyak peneliti yang meneliti tentang dimensi *aces to authority*. Oleh karena itu, untuk studi selanjutnya, direkomendasikan untuk meneliti lebih lanjut tentang *aces to authority* pada dimensi *collaborative governance* mitigasi bencana banjir di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543–571.
- Ansell, C. (2014). *Pragmatist Democracy Evolutionary Learning as Public Philosophy*. Oxford University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arfani, M. (2022). Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(1), 104–120. <https://doi.org/10.46799/journalsyntaxtransformation.v3i1.497>
- Basuki, I. (2019). Mitigasi Struktural Bencana Pada Infrastruktur Sistem Transportasi. In Shirley Savetlana Irza Sukmana Meizano Ardhi Muhammad Afri Yudamson (Ed.), *Ilmu-Ilmu Teknik: KEBENCANAAN 2019* (1st ed., Issue 1). UPT Perpustakaan Universitas Lampung ALAMAT. www.unila.ac.id
- Bima Ade Prayoga Setiawan, Yulyana, E., & Aryani, L. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP>, 7(1), 168–175. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/23921>
- Booher. (2002). Network power in collaborative planning. *Journal of Planning Education and Research*. *Sage*, 21(3), 221–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0739456X0202100301>
- DeSeve, E. (2007). *Creating Public Value Using Managed Networks* (1st ed.).
- Dirga, A. S., & Djafar, T. (2023). Implementasi Penanggulangan Bencana Studi Kasus Nagari Siaga Bencana (Nagasina) Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 5(2), 106–122. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v5i2.3777>
- Donahue, J. D. & R. J. Z. (2011). *Collaborative Governance: provate roles for public goals in turbulent times*. Pricention University Press.
- Faiza, I. M., Gunawan, G., & Andriani, W. (2022). Tinjauan Pustaka Sistematis: Penerapan Metode Machine Learning untuk Deteksi Bencana Banjir. *Jurnal Minfo Polgan*, 11(2), 59–63. <https://doi.org/10.33395/jmp.v11i2.11657>
- Haeril, H., Anilawati, N., & Suraya, S. (2021). Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 1–30.

<https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.182>

Hakim, A. L., Handoko, P., Nugroho, A., Sanjaya, N., Hadiono, A., Mulyani, I., Nasir, N., & Firdaus, S. A. (2023). Analisis Peran Aktor dalam Kebijakan Kemandirian Petani Konservasi Lahan melalui Program Flood Management in Selected River Basins (FMSRB). *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v14i2.22651>

Hardi, W. et al. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. In T. D. Press (Ed.), *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik* (1st ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.

Haris, A., Tahir, S., Nurjaya, M., & Baharuddin, T. (2023). Analisis Bibliometrik Tentang Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan: Inisiasi Kebijakan Untuk Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 314–324. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3394>

Hasan, A., Akbar, F., Cannafaro, F., Yusa, N., Santoso, F., & Amalia, N. (2024). Implementasi Komunikasi Bencana oleh BPBD Kota Bogor dalam Mitigasi Bencana Banjir. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1642–1651. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11880>

Hasna, A. L., & Darumurti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Kota Pekalongan. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 25–37. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210>

Hayudityas, B. (2020). Pentingnya Penerapan Pendidikan Mitigasi Bencana di Sekolah untuk Mengetahui Kesiapsiagaan Peserta Didik. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(9), 1689–1699.

Hazimah Latifah, Herbasuki Nurcahyanto, A. M. (2024). *ANALISIS PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG*. 1–23.

Hidayat, S. (2023). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Banjir Di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022*. eprints.stialanmakassar.ac.id. [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2023/08/pin_saputra_08-21-23-01-48-22\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2023/08/pin_saputra_08-21-23-01-48-22).pdf)

Hidayatullah, M. A., Purnaweni, H., & Yuwono, T. (2023a). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 276–285. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3472>

Hidayatullah, M. A., Purnaweni, H., & Yuwono, T. (2023b). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 276–285. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3472>

Ilhami, R., & Achmad, W. (2023). Collaborative Governance in Flood Management in Sumedang Regency. In *Journal of Governance* (Vol. 8, Issue 3). core.ac.uk. <https://doi.org/10.31506/jog.v8i3.21057>

Isza, M. (2019). Mitigasi Banjir ROB Perspektif Ecopreneur Muslim. *Al-Buhuts*, 15(1), 89–107. <https://doi.org/10.30603/ab.v15i1.973>

Kasiami, S. (2020). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 7–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/jian.v4i2.366>

Khafian, N. (2023). The Role Of Collaborative Governance In Indonesian Disaster Management. In *Journal of Governance and Administrative Reform* (Vol. 4, Issue 2, pp. 158–175). e-

journal.unair.ac.id.

<https://doi.org/10.20473/jgar.v4i2.53367>

Madani, I., Bachri, S., & Aldiansyah, S. (2022). Pemetaan Kerawanan Banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendo Kabupaten Banyuwangi Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geosaintek*, 8(2), 192. <https://doi.org/10.12962/j25023659.v8i2.11907>

Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52–61. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235>

Mutiawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>

Nilawangsa, C., Argenti, G., & Ramdani, R. (2023). Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana (Studi Kasus Kekeringan Di Desa Ridogalih Kec Cibusah Kab Bekasi). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 1822–1828. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3680>

Ningtyas, T., Larasati, E., Warsono, H., & Purnaweni, H. (2021). Optimization of Destana policies (Resilience Disaster Village) to improve community preparedness for flood disaster in Bojonegoro District, Indonesia. In *Management and entrepreneurship: trends of development* (Vol. 1, Issue 15). osf.io. <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2021-1/15-08>

Noer, K. U., & Putra, S. (2022). Collaborative Governance in Natural Disaster Mitigation in Bekasi Regency, Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 102. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.64094>

Nugroho, A. Y., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA NONGKOSAWIT KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 315-335.

Nugroho, S. P. (2012). *KERJASAMA SIPIL-MILITER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI KASUS TANGGAP DARURAT BANJIR JAKARTA 2013, 2014, 2015)*. Han.

Nuriawati, S. A., Hanani, R., & Rahman, A. Z. (2024). PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) PADA KLASTER V PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN PEMALANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-20.

Nurlaila Nurlaila, & Mas'ud Mas'ud. (2023). Manajemen Pra Bencana Alam Di Kabupaten Bima Dalam Perspektif Collaborative Governance. *Serat Acitya*, 12(1), 94–104. <https://doi.org/10.56444/sa.v12i1.603>

Nursofa, S., Rahman, A. Z., & Hanani, R. (2024). PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI TANJUNG KAIT DI KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-15.

Pramono, J., Wangi, M. S., Setiodjati, J. P., Kusumastuti, D., & Ibrahim, A. Z. (2023). The Ius Constituendum of Inter-agency Synergy Arrangements Related to Natural Disaster Mitigation and Action. *Sasi*, 29(4), 765. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1736>

Pratama, P. Y., & Achmad, N. (2020). Collaborative Governance dan Social Capital: Peran Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Disaster Management di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 6(1), 429–444.

<https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i1.102>

Ramadani, A., Lolo, C. S., Fitriani, R., Algifari, M. M., Payung, A., & Kurniawan, A. A. P. (2022). Mitigasi Bencana Kawasan Pesisir Kota Palu. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 5(1), 61–64. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v5i1.19409>

Rifai, A., Rusfiana, Y., Gunawan, R., Studi, P., & Pertahanan, S. (2018). Kerjasama Kodim 0503/JB dengan Pemkot Jakarta Barat ... | Rifai, Rusfiana, Gunawan | 29. *Jurnal Strategi Dan Kampanye Militer*, 4(3), 29–50. <http://139.255.245.7/index.php/SMK/article/view/275>

Riska, A., Rahman, A., & Usman, B. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(1), 82–92.

Romadhan, A. A., Fakhri, A. R., & Sihidi, I. T. (2023). Pengendalian Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lamong Kabupaten Gresik Melalui Pembangunan Tanggul. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(2), 267–278. <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.7652>

Rulinawaty, R., Samboteng, L., Aripin, S., Kasmad, M. R., & Basit, M. (2022). Implementation of Collaborative Governance in Flood Management in the Greater Bandung Area. In *Journal of Governance* (Vol. 7, Issue 1). repository.ut.ac.id. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i1.14710>

Sajida, Sekar Arum Nuswantari, & Ahmad Luthfi. (2023). Flood mitigation in urban areas: Adopting governance approach. *Sustinere: Journal of Environment and Sustainability*, 7(3), 207–219. <https://doi.org/10.22515/sustinere.jes.v7i3.303>

Setiawan, E., & Adhi Pramana, G. (2023). Improving the Effectiveness of Disaster

Mitigation in Wonogiri Regency, Indonesia Using House of Risk Method. In *Indonesian Journal of Geography* (Vol. 55, Issue 3, pp. 421–432). researchgate.net. <https://doi.org/10.22146/ijg.83856>

Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.161-174>

Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

Sudarmo. (2015). *Menuju model resolusi konflik berbasis governance: memuat pengalaman penelitian lapangan tentang isu pedagang kaki lima dan konflik antar kelompok*. Sebelas Maret University Press.

Suhindarno, H. (2021). STRATEGI BPBD DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Kasus di Kantor BPBD Bojonegoro). *IAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Bojonegoro*, 5(2), 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/jian.v5i2.380>

Sukmawati, A. M., & Puji Utomo. (2023). Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir Di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. *Tata Kota Dan Daerah*, 15(2), 141–152. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2023.015.02.5>

Sunarharum, T. M. (2021). Membangun Ketangguhan dan Adaptasi Transformatif: Kasus Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jakarta. *Reka Ruang*, 3(2), 71–80. [//journal.itny.ac.id/index.php/rekaruang/article/view/2149](http://journal.itny.ac.id/index.php/rekaruang/article/view/2149)

Susanti, E., & Anggara, I. P. (2021). Analisis Mitigasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(2), 324–332. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i2.1374>

- Syahrin, M., Rukmana, G., Rachman, D., Harakan, A., & Tadjine, F. (2019). *Sister city bottom up collaborative model plan as a major flooding mitigation in Samarinda*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2018.2284017>
- Taufiqurrahman, G., Mochamad Al Amien, Z., & Hasan Basri, M. (2021). Inovasi Prototype Pintu Dan Pompa Air Otomatis Dengan Mikrokontroller Di Kabupaten Batang. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 5(2), 81–87. <https://doi.org/10.55686/ristek.v5i2.103>
- Tauhid, F. A., & Zawani, H. (2018). Mitigating climate change related floods in urban poor areas: Green infrastructure approach. In *Journal of Regional and City Planning* (Vol. 29, Issue 2, pp. 98–112). core.ac.uk. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.2.2>
- Utami, A. P., Pratama, M. F., Utama, A. H., Firmansyah, A. A., Jl, A., Suparman, K., Utara, K. M., & Magelang, K. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Sosialisasi Mitigasi Bencana Bersama BPBD Kabupaten Magelang: Mendorong Keterlibatan Aktif Masyarakat di Desa Beseran. *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 63–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/tab-syir.v5i2.1090> Strategi
- Wibowo, Y. A., Ronggowulan, L., Arif, D. A., Afrizal, R., Anwar, Y., & Fathonah, A. (2019). Perencanaan Mitigasi Bencana Banjir Non-Struktural Di Daerah Aliran Sungai Comal Hilir, Jawa Tengah. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 4(2), 87–100. <https://doi.org/10.21067/jpig.v4i2.3632>
- Wicaksono, A. (2019). *Kolaborasi Multi Aktor dalam Program Restorasi Gambut di Provinsi Riau memaparkan mengenai kolaborasi multi aktor yang memiliki preferensi tujuan yang sama*. 111–125. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Widarti Gularsih Sukino, Muhammad Ahsan Samad, Nasir Mangngasing, & Abdul Rivai. (2019). Manajemen Mitigasi Bencana Kota Palu Palu City Disaster Mitigation Management. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.26>
- Widyaningsih, H. W. T. (2021a). Manajemen Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Banjarnegara. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 116. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3202>
- Widyaningsih, H. W. T. (2021b). Manajemen Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Banjarnegara. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 116. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3202>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yuhanah, T. (2014). Konsep Desain Shelter Mitigasi Tsunami. *Analytical Biochemistry*, 6(1), 1–13. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Yulianti, Y. D. et al. (2024). Adaptive Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168–184. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5870>
- Zahrotul Arofah, & Anggraeny Puspaningtyas. (2023). Optimalisasi Pelayanan Mitigasi Bencana Banjir di

Karangbinangun Lamongan Agar Masyarakat Peduli Akan Pentingnya Lingkungan. *Public Sphere Review*, 88–100. <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.85>